

**ANALISIS DAYA TARIK DUA PUSAT PELAYANAN  
DALAM PENGEMBANGAN SISTEM PERKOTAAN  
DI KABUPATEN PURWOREJO  
(Studi Kasus: Kota Kutoarjo dan Kota Purworejo)**

**TUGAS AKHIR**

Oleh :

**SRI BUDI ARTININGSIH**

**L2D 304 163**



**JURUSAN PERENCANAAN WILAYAH DAN KOTA  
FAKULTAS TEKNIK UNIVERSITAS DIPONEGORO  
SEMARANG  
2006**

## ABSTRAK

Pusat pelayanan yang terletak di dalam kawasan perkotaan menjadi tempat central aktivitas masyarakat, terbentuk sebagai kawasan yang paling dinamis dan menjadi denyut nadi perkembangan suatu wilayah. Berbagai fasilitas pelayanan yang lebih bervariasi membuat pusat pelayanan sebagai tempat yang menarik bagi masyarakat di luar kawasan pusat kota. Adanya pusat pelayanan yang mengalami kegagalan dalam perkembangannya disebabkan oleh banyak posisi daerah hinterland-nya yang justru terserap masuk ke dalam wilayah pusat yang lebih besar, berakibat daerah ini mengalami perkembangan yang stagnan atau bahkan mengalami kemunduran dalam pembangunannya, sehingga menyebabkan kesenjangan antara wilayah (Sukirno, 1976: 3).

Seperti yang terjadi pada wilayah studi yaitu Kota Purworejo dan Kota Kutoarjo, adanya kesenjangan antara kedua pusat pelayanan tersebut yang ditunjukkan oleh perbedaan tingkat pendapatan penduduk dan pertumbuhan penduduknya. Persamaan hirarki perkotaan dan pembangunan yang menonjol dari pusat pelayanan Kota Purworejo dan Kota Kutoarjo di Kabupaten Purworejo, sedangkan keduanya memiliki perbedaan peran dalam pengembangan wilayah Kabupaten Purworejo. Kota Purworejo sebagai pusat Ibukota kabupaten dan Kota Kutoarjo sebagai pusat ibukota kecamatan, dimana mampu berpengaruh pada perkembangan kedua wilayah tersebut. Untuk itu dilakukan studi ini, dimana pertanyaan penelitian yang dilakukan adalah **"Pusat pelayanan (Kota Kutoarjo dan Kota Purworejo) manakah yang memiliki daya tarik paling kuat?"** dan **"Strategi apakah yang dapat dilakukan guna mendukung pengembangan pusat pelayanan yang memiliki daya tarik paling rendah"**.

Pendekatan riset yang digunakan adalah pendekatan kuantitatif meliputi metode analisis Gravitasi, Skalogram Guttman, Indeks Sentralitas, Pembobotan dan pendekatan kualitatif meliputi metode analisis deskriptif kualitatif dan SWOT. Hasil analisis yang didapat adalah Perkembangan aktivitas masyarakat dalam menggunakan pusat pelayanan ini berkembang di sektor jasa. Pusat Pelayanan Kota Purworejo berkembang di sektor jasa pelayanan publik (administrasi, kelembagaan, hukum, pendidikan dan kesehatan), sedangkan pusat pelayanan Kota Kutoarjo berkembang di sektor pertanian (pemasaran hasil pertanian) dan sektor jasa yang mendukung pelayanan transportasi (angkutan umum dan pengiriman); Pusat pelayanan yang memiliki daya tarik lokasi terbesar adalah pusat pelayanan Kota Purworejo karena lebih mudah dijangkau dari seluruh kecamatan di Kabupaten Purworejo, dilalui oleh angkutan umum dan dekat dengan jaringan jalan; Pusat pelayanan yang memiliki daya tarik karena kondisi jaringan jalan yang baik untuk menuju Pusat Pelayanan adalah pusat pelayanan Kota Purworejo; Pusat pelayanan yang memiliki ketersediaan fasilitas perkotaan yang lebih lengkap adalah pusat pelayanan Kota Purworejo dan berdasarkan preferensi masyarakat fasilitas perkotaan di Kota Purworejo memiliki kondisi dan tingkat pelayanan fasilitas perkotaan yang lebih bagus; Kedua pusat pelayanan rata-rata mampu menjangkau kecamatan lain di Kabupaten Purworejo sejauh  $6,125 \frac{5}{4}$  10,693 Km, dan nilai interaksi terkuat dengan kecamatan lain di Kabupaten Purworejo dimiliki oleh pusat pelayanan Kota Kutoarjo (sebesar 120.659.282). Hasil studi ini diketahui bahwa kemampuan daya tarik dua pusat pelayanan Kota Purworejo dan Kota Kutoarjo, berdasarkan preferensi masyarakat menyatakan Kota Purworejo memiliki daya tarik lebih kuat dalam menarik masyarakat untuk beraktivitas di dalam pusat pelayanan Kota Purworejo, ditunjukkan oleh total nilai preferensi masyarakat sebesar 272, kemampuan keterpusatan fasilitas perkotaan berhirarki I, kemampuan jangkauan pelayanan terluas dengan kecamatan lain di Kabupaten Purworejo. Pusat pelayanan Kota Kutoarjo yang memiliki kemampuan daya tarik rendah, dinilai memiliki kemampuan jangkauan pelayanan yang sama luasnya dengan Kota Purworejo, sehingga pusat pelayanan ini memang pantas memiliki hirarki yang sama dengan pusat pelayanan Kota Purworejo.

Setelah dilakukan analisis dalam studi ini, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa pusat pelayanan yang memiliki kemampuan daya tarik paling kuat adalah Kota Purworejo. Pusat pelayanan Kota Kutoarjo dinilai pantas sebagai pusat pelayanan berhirarki I karena memiliki kemampuan jangkauan pelayanan yang sama besarnya dengan pusat pelayanan Kota Purworejo. Sedangkan, pusat pelayanan Kota Kutoarjo yang memiliki daya tarik rendah dapat dilakukan strategi khusus guna mendukung pengembangan wilayahnya, antara lain: pengembangan fungsi pelayanan di bidang pelayanan jasa transportasi, dan peningkatan jumlah sarana maupun kualitas pelayanan perdagangan dan jasa guna mendukung pengembangan pusat pelayanan Kota Kutoarjo di bidang transportasi. Misalnya, jasa penginapan (Hotel), jasa angkutan umum (pangkalan ojek).

**Key words :** pusat pelayanan dan daya tarik tempat pusat

## BAB I PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pusat kota<sup>1</sup> menjadi pusat kegiatan masyarakat yang terbentuk sebagai kawasan yang paling dinamis, merupakan denyut nadi perkembangan suatu wilayah. Ia memiliki kecenderungan untuk menjadi besar dan berkembang dengan dukungan wilayah sekitarnya atau *hinterland*-nya. Berbagai fasilitas dan lapangan kerja yang lebih bervariasi membuat suatu kota sebagai tempat yang menarik bagi masyarakat di luar kawasan perkotaan. Tentunya hal tersebut menyebabkan pusat kota banyak diminati oleh masyarakat setempat maupun pendatang untuk beraktivitas di dalam kota, walaupun dia bertempat tinggal di luar kawasan perkotaan tersebut (Bapenas, 2001: 1).

Christaller (1933) dalam Djojodipuro (1992: 134), mendefinisikan tempat pusat atau lebih dikenal dengan *central place* merupakan kota-kota yang menyajikan barang dan jasa bagi masyarakat di wilayah sekelilingnya dengan membentuk suatu hirarki berdasarkan jarak dan ambang batas penduduk. Pembagian hirarki pelayanan tersebut, mengakibatkan suatu kota (dengan hirarki pelayanan paling tinggi) secara alami memiliki potensi daya tarik<sup>2</sup> yang besar dan berpengaruh besar bagi daerah-daerah yang kekuatannya lebih kecil, dimana kota tersebut mempunyai kemampuan menarik potensi, sumber daya dari daerah lain dan kota di bawahnya.

Richardson dalam Widiarto (2003), menyatakan bahwa bagi kota kecil dan menengah terdapat pemusatan perkembangan di kota besar yang menimbulkan semakin tingginya ketergantungan mereka pada kota di atasnya. Hal tersebut mengakibatkan inovasi dan kemajuan teknik menumpuk pada wilayah-wilayah makmur tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut Sukirno (1976), menyatakan kondisi yang terjadi adalah terdapatnya suatu kota yang mengalami kegagalan dalam perkembangannya karena banyak posisi daerah *hinterland*-nya yang justru terserap masuk ke dalam wilayah perkotaan yang lebih besar. Akibatnya daerah ini mengalami perkembangan yang stagnan atau bahkan mengalami kemunduran dalam pembangunannya. Kesenjangan yang terjadi bisa diakibatkan oleh struktur ekonomi, tingkat pendapatan, prasarana dan sarana yang tersedia serta tingkat pengangguran.

Namun perbedaan kemampuan pelayanan dari kota-kota tersebut apabila dibiarkan berkembang secara alami akan menimbulkan fenomena kesenjangan wilayah secara spasial dan

---

<sup>1</sup> Definisi pusat kota adalah bagian kota yang mudah dijangkau dari berbagai penjuru kota dengan kendaraan/berjalan kaki, dirancang sebagai pusat kegiatan masyarakat kota terutama pusat pertokoan dan rekreasi yang ditempatkan secara terpadu dengan daerah perumahan (*Kamus Tata Ruang, 1992*).

<sup>2</sup> Pengertian akan Daya Tarik adalah faktor terpenting yang memiliki kekuatan yang sangat besar sehingga membuat manusia datang ke suatu obyek atau daerah tujuan (destinasi) (Gunn, 1988:107).

ekonomi yang dicirikan dengan perbedaan tingkat pertumbuhan dan perkembangan antar wilayah serta adanya perbedaan dan tingkat kemakmuran (Gilbert dan Gulger, 1996). Kesenjangan wilayah apabila dibiarkan berlarut-larut maka akan memberikan pengaruh yang kurang baik terhadap kelangsungan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan wilayah. Adapun konsekuensi yang ditimbulkannya, yaitu<sup>3</sup>:

1. Makin besarnya migrasi penduduk desa, terutama yang memiliki ketrampilan (*skill*), masuk ke wilayah perkotaan karena peluang untuk mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi.
2. Investasi cenderung mengalir ke wilayah yang sudah berkembang karena peluang untuk meraih keuntungan lebih besar karena faktor pasar yang lebih mendukung.
3. Pemerintah cenderung melakukan investasi pembangunan di wilayah yang sudah berkembang karena kebutuhannya yang lebih besar.

Seiring berlangsungnya pembangunan ini, guna mengatasi terjadinya kesenjangan wilayah antara kota utama dengan kota menengah/kecil. Pemerintah Daerah Kabupaten Purworejo menciptakan strategi pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Purworejo, diarahkan untuk mendorong proses pertumbuhan pada daerah-daerah yang berpotensi untuk berkembang dengan menghindari terjadinya *ke-primacy-an* kota-kota yang berperan sebagai pusat pertumbuhan wilayah. Dengan demikian, diharapkan tidak terjadi polarisasi yang kuat ke arah pusat pertumbuhan utama. Pengembangan kota ini dilakukan dengan cara menyediakan sarana dan prasarana kota yang dibutuhkan sesuai dengan peran dan fungsi kota tersebut. Pengembangan akses antar kota juga perlu dilakukan untuk mendukung terjadinya interaksi keruangan (RTRW Kabupaten Purworejo Thn. 2003).

Strategi pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Purworejo, ditunjukkan dengan adanya pembagian struktur daerah perkotaan menjadi 4 (empat) hirarki<sup>4</sup> kota, yaitu:

- Hirarki I : Purworejo dan Kutoarjo
- Hirarki II : Pituruh, Bagelen dan Purwodadi
- Hirarki III : Butuh, Grabag, Bayan, Banyuurip, Bener
- Hirarki IV : Bruno, Ngombol, Kemiri, Kaligesing, Gebang dan Loano

Sesuai dengan klasifikasi hirarki tersebut, terdapat dua kota utama (Hirarki I yaitu Kota Purworejo dan Kota Kutoarjo), dimana keduanya sangat menonjol dalam pertumbuhan wilayahnya dan memiliki peran penting dalam memicu perkembangan wilayah Kabupaten Purworejo. Peran penting tersebut ditunjukkan oleh distribusi pendapatan daerah terhadap kabupaten<sup>5</sup> dan fungsi

<sup>3</sup> Williamson dikutip dari Ridho (1998).

<sup>4</sup> Hirarki merupakan struktur atau tingkatan pelayanan (dari pelayanan tingkat rendah hingga tingkat tinggi), dinilai berdasarkan ketersediaan jenis dan jumlah pelayanan (*Djojodipuro, 1992: 134-136; Carter, 1972: 60-67; Yeats, 1971: 152-156*).

<sup>5</sup> BPS. 2003. *PDRB Kecamatan se Kabupaten Purworejo*.

pusat pelayanan perkotaan yang mampu melayani masyarakat tingkat regional (Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo No. 6 Tahun 2005).

Dalam perkembangannya kedua pusat pelayanan ini memiliki peran yang berbeda, Kota Purworejo sebagai pusat Ibukota Kabupaten Purworejo, dan Kota Kutoarjo sebagai pusat Ibukota Kecamatan di Kabupaten Purworejo. Kebijakan pemerintahan tersebut memberikan peluang yang berarti dalam mendukung pertumbuhan wilayah Kota Purworejo, dan berpengaruh pada keseimbangan spasial antar dua kota utama tersebut. Hal tersebut dapat ditunjukkan oleh orientasi pembangunan sarana dan prasarana perkotaan dan segala aliran aktivitas masyarakat lebih tertarik menuju Kota Purworejo. Ketidak-seimbangan spasial antara dua kota ini dapat mengakibatkan kesenjangan wilayah antara dua pusat pelayanan yang menjadi kota unggulan di Kabupaten Purworejo (yaitu Kota Purworejo dan Kota Kutoarjo), terjadi akibat adanya kecenderungan masyarakat (termasuk *hinterland* Kota Kutoarjo) lebih memilih Kota Purworejo dalam melakukan aktivitas menggunakan fasilitas-fasilitas perkotaannya.

Konsentrasi aktivitas di pusat Kota Purworejo salah satunya dapat ditunjukkan oleh laju pertumbuhan kepadatan penduduk tinggi terdapat yaitu 45.795 jiwa pada tahun 1997 menjadi 46.308 pada tahun 2003, dengan kenaikan sebesar 513 jiwa selama 5 tahun atau 106 jiwa/tahun. Sedangkan, pada Kota Kutoarjo mengalami penurunan jumlah penduduk sebesar 221 jiwa, dimana jumlah penduduk tahun 1997 sebesar 27.033 menjadi 26.812 jiwa pada tahun 2003 (BPS, 1997-2003).

Perbedaan kemampuan untuk terus berkembang dari dua pusat pelayanan (Kota Purworejo dan Kota Kutoarjo), ditunjukkan oleh perbedaan laju pertumbuhan ekonomi yang digambarkan dengan perbedaan pendapatan rata-rata mengakibatkan terjadinya kesenjangan wilayah antara dua pusat tersebut, pendapatan perkapita penduduk tertinggi terdapat di Kecamatan Purworejo sebesar Rp. 1.613.480,-. Sedangkan, pendapatan perkapita penduduk di Kecamatan Kutoarjo sebesar Rp. 1.170.180,- dan kecamatan lainnya rata-rata berkisar Rp. 955.120,- (PDRB Kecamatan se-Kabupaten Purworejo, 2003).

Kondisi hirarki perkotaan yang sama, fungsi pelayanan berskala regional, dan kemampuan perkembangan wilayah yang menonjol di Kabupaten Purworejo, pusat pelayanan Kota Purworejo dan Kota Kutoarjo tentunya keduanya memiliki perbedaan daya tarik pelayanan terhadap daerah *hinterland*-nya. Perkiraan kemampuan pelayanan perkotaan yang berbeda, apabila tidak terdapat pembagian fungsi perkotaan yang jelas dalam pengembangan sistem perkotaan di Kabupaten Purworejo tentunya salah satu dari kedua pusat pelayanan tersebut (dalam perkembangan wilayahnya) akan mengalami pertumbuhan yang stagnan bahkan menurun. Kondisi tersebut disebabkan oleh besarnya pergerakan manusia dalam beraktivitas dan menggunakan pusat